

PENGARUH PAD TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

Halimatus Sa'diyah & Yetty Tri Putri
Politeknik Negeri Lhokseumawe

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the influence of District Own Source Revenue to government managerial performance of Aceh Utara District. The sample selection using target sampling, that involves 75 respondents in Aceh Utara district government. Primary data were obtained through questionnaires. Data was collected through questionnaires survey method is to provide answers to the problems faced by explaining the relationships between variables with hypothesis testing. The research result shows that 78,3% of District Own Resource Revenue has contribution to government managerial performance in Aceh Utara District. Meanwhile 21,7% was another influenced factors that was not observed in this research. The result of this study also indicates the hypothesis that the district own revenue positively influences participation on government managerial performance can be proved.

Keyword: District own resource revenue, government managerial performance.

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk melihat sejauh mana pengaruh dari pemanfaatan PAD terhadap kinerja manajerial di kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini melibatkan 75 responden yang mewakili setiap SKPD/ instansi di kabupaten Aceh Utara. Jenis penelitian ini menggunakan data primer yang diolah dari hasil kuesioner dengan metode survey yang menjelaskan hubungan antara variable dengan pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 78,3% hasil dari PAD mempengaruhi kinerja manajerial pemerintah kabupaten Aceh Utara, Sementara pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati adalah sebesar 21,7%, dan merupakan pengaruh faktor lain diluar keempat sub variabel bebas. Hasil dari penelitian ini juga membuktikan bahwa secara hipotesis partisipasi PAD positif mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dapat dibuktikan.

Kata Kunci: PAD, Kinerja Manajerial Pemerintah.

PENDAHULUAN

Menyikapi Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan warna baru dalam pemerintahan daerah saat ini yaitu melalui otonomi daerah. Pemahaman atas Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki hak, wewenang maupun kewajiban sebagai daerah otonom yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Hal serupa juga telah didukung oleh adanya reformasi politik yang lahir setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang kemudian telah membawa dampak yang begitu luas dengan ditandai adanya pembaharuan khususnya dalam bidang pemerintahan. Kedua hal tersebut sangat dirasakan oleh seluruh daerah yang ada di Indonesia termasuk propinsi yang telah berganti nama dua kali yaitu Provinsi Aceh yang sebelumnya diganti dengan sebutan Nanggroe

Aceh Darussalam (NAD) setelah pada awalnya bernama Daerah Istimewa Aceh. Perubahan tersebut jelas memperlihatkan adanya struktur maupun mekanisme yang lahir karena terjadinya pergeseran paradigma baru pada sistem pemerintahan daerah.

Persoalan di atas jelas berdampak pada seluruh Kabupaten maupun Kota yang ada di wilayah Provinsi Aceh ditambah lagi pada tahun 2010 lalu, pemerintah pusat melalui Presiden telah menyerahkan DIPA untuk Provinsi Aceh senilai Rp. 14,5 Triliun (SerambiNews.Com: 6 Januari 2010). Hal ini sangat perlu dikaji kembali sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan bentuk efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran tersebut. Disadari maupun tidak, kebobrokan yang terjadi saat ini telah memberikan implikasi negatif bagi perkembangan daerah, khususnya di Kabupaten maupun Kota dan hal tersebut merupakan salah satu indikasi yang sangat signifikan mempengaruhi kinerja terhadap penggunaan atau implementasi anggaran pemerintah daerah di masa-masa mendatang. Kekhawatiran ini menjadi penyebab utama berhasil tidaknya kegiatan atau program pemerintah daerah sehingga akan mengganggu penilaian pemerintah pusat terhadap ukuran kinerja yang mampu dicapai..

Melihat perkembangan penggunaan anggaran saat ini di Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Utara, telah memicu berbagai tuntutan masyarakat agar penggunaan anggaran dalam bentuk belanja daerah harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan melalui kinerja yang terukur. Disamping itu, peraturan atau qanun yang berlaku bagi setiap daerah harus kembali ditinjau ulang agar target maupun realisasi yang dicapai benar-benar sesuai dengan fakta yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan apabila perlu dengan membentuk aturan khusus yang memungkinkan untuk mendongkrak PAD tersebut (SerambiNews.Com: 21 April 2010). Hal ini mungkin saja dilakukan apabila pemerintah telah menunjukkan itikad baik melalui hasil kerjanya yang mampu membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat.

Data berikut menunjukkan perkembangan PAD Kabupaten Aceh Utara dalam lima tahun terakhir (data tahun 2010 masih dalam proses):

Tabel 1
Perkembangan PAD PAD Kabupaten Aceh Utara

Tahun	Realisasi PAD	Persentase	Keterangan
2005	55.368.375.695,-	-	-
2006	112.872.199.884,-	103,86	Naik
2007	101.357.843.058,-	10,20	Turun
2008	79.720.897.562,-	21,35	Turun
2009	81.754.762.617,-	2,55	Naik

Sumber: DPKAD Kabupaten Aceh Utara (Data diolah: 2011)

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan PAD untuk Kabupaten Aceh Utara masih terkesan belum maksimal, artinya realisasi PAD yang diharapkan naik setiap tahun, ternyata masih belum konsisten, bahkan memberikan kesan secara kuantitatif masih terjadi kelemahan maupun ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam mendorong kemandirian daerah. Hal ini disinyalir kuat bahwa kinerja manajerial yang seharusnya mampu ditingkatkan setiap tahun, malah menyisakan suatu indikasi yang belum optimal. Untuk itu sangat dibutuhkan adanya pengelolaan yang baik melalui keputusan maupun sistem yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah sehingga terwujud tujuan daerah yang solid dan berkesinambungan.

TINJAUAN TEORITIS

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penjelasan atas UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan asli daerah adalah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah (Mardiasmo: 2002)

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah merupakan salah satu bentuk pendapatan asli daerah. Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah yang mana bersifat memaksa. Menurut UU No. 34 Tahun 2000 dalam Sri Suranta dan Muhammad Syarifurrahman (2005) menyebut bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari sudut pandang kewenangan pemungutannya, pajak daerah secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Propinsi (Pajak Propinsi), berupa pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air pemukiman, dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota (pajak Kabupaten/Kota), antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir (Mardiasmo dalam Sri Suranta dan Muhammad Syarifurrahman: 2005).

Retribusi Daerah

Sumber pendapatan lain yang dapat dikategorikan dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Kesit Bambang Prakosa: 2003).

Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan (Kesit Bambang Prakosa: 2003) dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintahan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan lingkungan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Salah satu penyebab diberlakukannya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan roda pemerintah daerah. Termasuk didalamnya adalah pengelolaan kekayaan daerah berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sektor industri. Dengan adanya otonomi daerah maka inilah saatnya bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

Undang-undang mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Badan Usaha Milik Daerah ini bersama sektor swasta atau Asosiasi Pengusaha Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi daerah sehingga dapat menunjang kemandirian daerah dalam pembangunan perekonomian daerah.

Perusahaan daerah dirumuskan sebagai suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah. Dengan demikian perusahaan daerah memiliki dua fungsi yakni sebagai dinamisator perekonomian daerah yang berarti harus mampu memberikan stimulus bagi perkembangan perekonomian daerah dan sebagai penghasilan pendapatan daerah. Jadi perusahaan daerah harus mampu memberikan manfaat ekonomis sehingga terjadi keuntungan yang dapat disetorkan ke kas daerah (Kaho, 2001:141).

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat, dan juga bisa dengan menerbitkan obligasi daerah.

Disamping hal yang tersebut di atas, lain-lain pendapatan yang sah dapat berupa penerimaan jasa giro di bank, pendapatan bunga deposito, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan, pendapatan dari pengembalian biaya proyek yang lebih, penyewaan fasilitas social dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan (DPKKD Kabupaten Aceh Utara: 2009).

Kinerja Manajerial

Kinerja (Indra Bastian, 2001:329) memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan atau kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum juga dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Larry D Stout (1993) dalam Indra Bastian (2001:329) menyatakan bahwa : "pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah penilaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses".

Menurut Mardiasmo (2002:121) sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu system yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial dan non financial. System pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

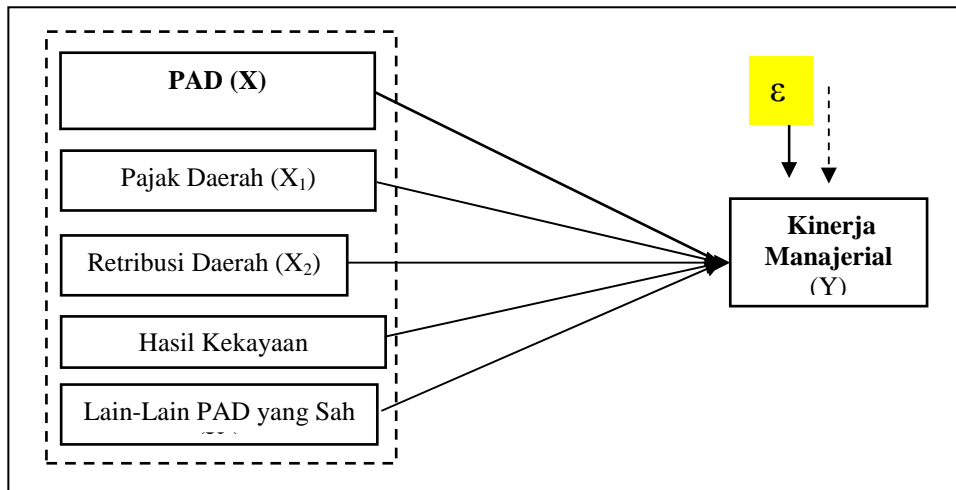
Sedangkan menurut Nyhan and Martin (1999p. 348) dalam Raili M. Pollanen (2005: 5) menyatakan : *Performance measurement in the public sector* didefinisikan sebagai *"the regular collection and reporting of information about the efficiency, quality, and affectiveness of government programs"*.

Wehrich dan Koontz (2005:27) mendefinisikan kinerja manajerial sebagai kinerja manajer dalam mengerti dan memahami fungsi manajer dalam mencapai sasaran kinerjanya, yang diukur dari bagaimana manajer tersebut menjalankan aktivitas manajerialnya seperti: *planning, organizing, staffing, leading* dan *controlling*.

METODE PENELITIAN.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain analisis kausalitas. Mudrajad Kuncoro (2003:10) mengemukakan bahwa penelitian kausalitas merupakan penelitian yang selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih juga menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi penelitian ini menganalisis apakah ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila ada pengaruh, seberapa besar pengaruh tersebut.

Berikut model penelitian atau paradigma penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Model Penelitian

Keterangan :

- : Pengaruh secara bersama-sama
- : Pengaruh secara individu

----►: ε Pengaruh variabel lain yang tidak diteliti

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Instansi terkait yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdapat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yaitu sebanyak 15 SKPD/Instansi. Penelitian ini akan menentukan populasi sasaran (*target population*). Responden dalam penelitian ini adalah lima responden pada setiap SKPD/Instansi yang berada pada level Kepala Dinas, Kabag, Kasie dan Staf Senior yang berkecimpung dalam bidang pengelolaan PAD, sehingga jumlah responden ditetapkan mewakili setiap SKPD/Instansi, sehingga total responden berjumlah 75 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) digunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Analisis penggunaan analisis regresi berganda dalam penelitian ini karena variabel independen (X) dalam penelitian ini lebih dari satu, yaitu tiga variabel dan tidak ada hubungan antara variabel independen tersebut. Analisis ini bermanfaat untuk memprediksi pengaruh beberapa variabel independen atau *explanatory* variabel terhadap dependen yang telah ditetapkan.

Persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

dimana :

- Y adalah kinerja manajerial pemerintah
- β_0 adalah konstanta, yaitu nilai Y jika semua variabel X bernilai nol
- β_1 adalah koefisien regresi dari X_1
- β_2 adalah koefisien regresi dari X_2
- β_3 adalah koefisien regresi dari X_3
- β_4 adalah koefisien regresi dari X_4
- X_1 adalah pajak daerah
- X_2 adalah retribusi daerah
- X_3 adalah hasil kekayaan yang dipisahkan
- X_4 adalah lain-lain PAD yang sah
- ε adalah variabel lain yang tidak diuji

Berdasarkan hasil pengolahan data seperti diuraikan diatas maka dapat dibentuk persamaan regresi sub variabel pajak daerah (X_1), sub variabel retribusi daerah (X_2), sub variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) dan sub variabel lain-lain pendapatan yang sah (X_4) terhadap kinerja manajerial (Y) sebagai berikut:

$$\hat{Y} = -0,322 + 0,419 X_1 + 0,313 X_2 + 0,303 X_3 + 0,137 X_4$$

Koefisien regresi hasil estimasi pada persamaan di atas semuanya bertanda positif yang menunjukkan bahwa realisasi pajak daerah yang makin optimal akan meningkatkan kinerja manajerial. Demikian juga retribusi daerah yang optimal, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan yang sah yang optimal akan meningkatkan kinerja manajerial.

Uji F dan Uji t

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 9,027 dan nilai ini menjadi statistik uji yang akan dibandingkan dengan nilai F_{tabel} . Dari tabel F untuk $\alpha = 0.05$

dan derajat bebas (4;10) diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,478. Karena F_{hitung} (9,027) lebih besar dari F_{tabel} (3,478) maka dengan tingkat kekeliruan 5% ($\alpha=0.05$) diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_a diterima, artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa instrumen Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari sub variabel pajak daerah, sub variabel retribusi daerah, sub variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan sub variabel lain-lain pendapatan yang sah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara.

Hasil Uji t

Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 2,228 yang diperoleh dari tabel t pada $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas 10 untuk pengujian dua arah. Nilai t_{hitung} sub variabel pajak daerah sebesar 2,319. Karena nilai t_{hitung} (2,319) lebih besar dari t_{tabel} (2,228) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_a diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari sub variabel pajak daerah pada instrumen Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja manajerial di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Nilai t_{hitung} sub variabel retribusi daerah sebesar 2,296. Karena nilai t_{hitung} (2,296) lebih besar dari t_{tabel} (2,228) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_a diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari sub variabel retribusi daerah pada instrumen Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja manajerial di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Nilai t_{hitung} sub variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 2,299. Karena nilai t_{hitung} (2,299) lebih besar dari t_{tabel} (2,228) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_a diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari sub variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada instrumen Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja manajerial di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Nilai t_{hitung} sub variabel lain-lain pendapatan yang sah sebesar 0,844. Karena nilai t_{hitung} (0,844) lebih kecil dari t_{tabel} (2,228) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menerima H_0 sehingga H_a ditolak. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari sub variabel lain-lain pendapatan yang sah pada instrumen Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja manajerial di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara.

Jadi melalui penelitian ini ditemukan bahwa 78,3% perubahan kinerja manajerial di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara dapat dijelaskan oleh perubahan keempat sub variabel instrumen Pendapatan Asli Daerah. Melalui interpretasi lain dapat diartikan bahwa secara bersama-sama sub variabel pajak daerah, sub variabel retribusi daerah, sub variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta sub variabel lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi/pengaruh sebesar 78,3% terhadap kinerja manajerial di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Sementara pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati adalah sebesar 21,7%, dan merupakan pengaruh faktor lain diluar keempat sub variabel bebas (sub variabel pajak daerah, sub variabel retribusi daerah, sub variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta sub variabel lain-lain pendapatan yang sah).

Melalui hasil perkalian *standardized coefficients* dengan *correlations-zero order* yang ada pada tabel 5.9, dapat diketahui bahwa sub variabel pajak daerah

memberikan kontribusi/pengaruh yang paling besar terhadap kinerja manajerial (yaitu $0,419 \times 0,714 = 29,9\%$), disusul kemudian sub variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (yaitu $0,378 \times 0,597 = 22,6\%$), di urutan ketiga sub variabel retribusi daerah (yaitu $0,358 \times 0,551 = 19,7\%$). Sementara sub variabel variabel lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi/pengaruh yang paling kecil terhadap kinerja manajerial di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara (yaitu $0,143 \times 0,425 = 6,1\%$).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang diperoleh pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
2. Retribusi daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
4. Lain-lain pendapatan yang sah secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
5. Instrumen Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Saran

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah hendaknya meningkatkan kembali kinerja manajerial melalui program-program yang dapat mendukung terciptanya PAD yang baru sehingga mampu meningkatkan PAD secara keseluruhan, khususnya pada lain-lain pendapatan yang sah.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah lagi kajian pada variabel independen lain seperti Good Corporate Governance, Sistem Keuangan Daerah, Desentralisasi, Pengendalian Internal dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.
- Bambang Haryadi. 2002. *Analisis Pengaruh Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Suatu Kajian Empiris di Propinsi Jawa Timur)*. Simposium Nasional V Semarang 5-6 September 2002.
- Deddi Nordiawan. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit: Salemba Empat: Jakarta.

- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah. 2009. *Tentang Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah*. Aceh Utara.
- Guilford, J.P. (1956). *Fundamental Statistics in Psychology and Education*. New York. McGraw Hill.
- Gujarati, Damodar N. 2003. *Basic Econometrica*. 4th Edition. New York: McGraw-Hill.
- Indra Bastian. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Pusat Pengembangan Akuntansi. BPFE. Yogyakarta.
- , 2003. *Sistem Akuntansi Sektor Publik (Modul untuk Pelatihan dan Penyusunan Laporan Keuangan)*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kaho Josef Riwu. 2001. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kesit Bambang Prakosa. 2004. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY)*. JAAI Vol. 08 No. 2, Desember 2004.
- Republik Indonesia. 2005. *Undang-Undang Otonomi Daerah (Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004)*. Penerbit: Media Abadi. Yogyakarta.
- Miah, N.Z and Mia, Lokman. 1996. Decentralization, Accounting Control and Performance of Government Organization; A New Zealand Empirical Study. *Financial Accountability and Management*. August. Vol. 12, No. 3, pp. 173-189.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi*. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mudrajat Kuncoro. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga-Jakarta
- Nirwana .SK. Sitepu. 1995. *Analisis Jalur (Path Analysis)*. LP3E Unpad.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Nur Indriantoro. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Manajemen dan Akuntansi*. BPFE-UGM. Yogyakarta.
- Nurmisdah. (2008). *Analisis Kinerja Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe*.
- Pollanen, Raili M. 2005. *Performance Measurement in Municipalities: Empirical Evidence in Canadian Context*. International Journal of Public Sector Management Vol. 18 No. 1, pp 4-24.

- Rosmaini. (2006). *Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara*.
- Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods for Business, A Skill building Approach*. Fourth Edition. Wiley. Pp. 87,
- Serambi Online. 2010. *GeRAK Minta DPRA SElektif Bahas PPAS 2011*. www.serambinews.com. 19 Agustus 2010.
- Siegel, G. Ramanauskas-Marconi, and Helena. 1989. *Behavioral Accounting*. South-Western Publishing Co. Ohio.
- Sri Suranta dan Muhammad Syarifiqurrahman. 2005. *Eksistensi Pajak Daerah Melalui Pajak Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Surakarta*. Empirika Vol. 18 No. 1, Juni 2005.
- Sugiyono. 2004. *Statistika Untuk Penelitian*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineke Cipta, Jakarta.
- Syukriy Abdullah & Abdul Halim. 2003. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali)*. Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya 16-17 Oktober 2003.
- Wehrich H & Koontz, H. 2005. *Management : A Global Prespective*. McGraw-Hill Education (Asia).